

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
PERLINDUNGAN ANAK DALAM KUHP**

Fregy Andhika Perkasa¹, M.Adaninggar², Asmak UI Hosnah³,

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143, Indonesia

Alamat e-mail : freggy.andhika200@gmail.com¹, adaninggar17@gmail.com²,
asmak.hosnah@unpak.ac.id³

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus pemerkosaan adalah hal penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Mekanisme penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini masih memerlukan peningkatan dalam efektivitasnya. Lembaga perlindungan anak seperti KPAI memiliki peran penting dalam memberikan bantuan dan perwakilan hukum bagi anak-anak korban. Tantangan dalam memastikan perlindungan optimal termasuk akses terhadap layanan yang sesuai dan penanganan kasus yang sensitif. Upaya pencegahan dapat ditingkatkan melalui penguatan kerangka hukum, peran masyarakat, peningkatan kesadaran, dan program preventif yang efektif. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki mekanisme penegakan hukum, peran lembaga perlindungan anak, dan upaya pencegahan tindak pidana pemerkosaan anak melalui kerangka hukum yang ada.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pemerkosaan, Anak.

ABSTRACT

Legal protection of children in cases of rape is important in the Indonesian criminal law system. The law enforcement mechanism for these cases still requires improvement in its effectiveness. Child protection institutions such as KPAI have an important role in providing legal assistance and representation for child victims. Challenges in ensuring optimal protection include access to appropriate services and handling sensitive cases. Prevention efforts can be improved through strengthening the legal framework, the role of the community, increasing awareness, and effective preventive programs. This study aims to investigate law enforcement mechanisms, the role of child protection institutions, and efforts to prevent the crime of child rape through the existing legal framework.

Keywords : Legal Protection, Crime of Rape, Children.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perlindungan anak dari tindak pidana pemerkosaan merupakan masalah yang sangat sensitif dan penting. Anak-anak rawan terhadap berbagai jenis kekerasan, termasuk pemerkosaan, yang dapat memiliki efek negatif jangka panjang terhadap kesehatan dan pertumbuhan mereka.¹ Di tengah tantangan penegakan hukum dan perlindungan yang sering kali rumit, penting untuk memahami dasar masalah ini secara menyeluruh. Pertama-tama, perlu diakui bahwa anak-anak adalah kelompok yang rentan dan berada dalam kondisi yang sangat bergantung pada orang dewasa untuk melindungi hak-hak mereka. Namun, ironisnya, anak-anak sering menjadi sasaran kejahatan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi mereka, seperti orang tua, anggota keluarga, atau orang-orang di sekitar mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sistem hukum yang solid untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual.

Berbagai undang-undang Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur perlindungan anak dari tindak pidana pemerkosaan. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasi dan penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai masalah yang kompleks. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas sistem peradilan pidana merupakan masalah utama. Ini terutama berlaku di daerah-daerah yang berkembang atau terpencil. Proses penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum dalam kasus pemerkosaan anak sering kali tertunda karena kekurangan infrastruktur dan petugas penegak hukum yang memadai. Akibatnya, banyak kasus pemerkosaan anak tidak dilaporkan atau ditangani secara tepat, meninggalkan korban tanpa keadilan dan pemulihan yang layak.

Selain itu, ada kesulitan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang masalah pemerkosaan anak. Korban pemerkosaan sering

¹ Dinsos PPPA - MENGENALI TINDAK KEKERASAN PADA WANITA DAN ANAK-ANAK.
<https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/596/mengenali-tindak-kekerasan-pada-wanita-dan-anak-anak>.

menolak untuk melaporkan kasus pemerkosaan karena stigma dan tekanan sosial, terutama jika pelaku adalah orang yang mereka kenal. Proses penegakan hukum dan pemulihan juga dapat tertunda karena korban tidak percaya pada sistem hukum dan kekurangan dukungan psikososial. Lebih lanjut, lembaga perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sangat penting dalam membantu dan mendukung korban pemerkosaan anak. Namun, lembaga-lembaga tersebut seringkali tidak dapat memberikan dukungan yang memadai bagi korban karena masalah sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan kapasitas.

Dalam situasi seperti ini, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam dan menyeluruh untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan perlindungan anak terhadap pemerkosaan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang masalah ini, langkah-langkah yang lebih efisien dan berkelanjutan dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan anak dan mencegah pemerkosaan di masa depan.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang melibatkan anak di Indonesia?
2. Apa yang dapat dilakukan lembaga perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), untuk membantu dan mewakili anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan?
3. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dapat ditingkatkan melalui kerangka hukum pidana yang ada?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menyelidiki dan mempelajari sistem penegakan hukum yang ada terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan yang melibatkan anak di Indonesia, termasuk proses penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum, dan untuk menemukan hambatan yang mungkin muncul dalam proses ini.
2. Mengidentifikasi fungsi dan kontribusi lembaga perlindungan anak, terutama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam menyediakan bantuan, dukungan, dan representasi hukum bagi anak-anak yang menjadi korban

pemeriksaan, dan menilai seberapa efektif tindakan yang telah diambil oleh lembaga tersebut.

3. Mengidentifikasi metode dan tindakan konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencegahan pemerkosaan anak dengan memperkuat sistem hukum pidana saat ini, termasuk perubahan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penerapan program intervensi yang efektif.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan adalah dengan suatu Analisis Perbandingan Hukum. Metode ini melibatkan perbandingan antara kerangka hukum perlindungan anak dari tindak pidana pemerkosaan di Indonesia dengan kerangka hukum yang berlaku di negara-negara lain. Dengan membandingkan peraturan-peraturan hukum, kebijakan, dan praktik-praktik terbaik dari negara-negara lain, peneliti dapat mengidentifikasi pendekatan yang efektif dalam melindungi anak-anak dari pemerkosaan, serta mengevaluasi keunggulan dan kelemahan dari sistem hukum yang ada. Analisis perbandingan hukum ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat tentang praktik terbaik di tingkat internasional dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Indonesia dapat mengambil inspirasi dan belajar dari pengalaman negara lain untuk memperkuat kerangka hukumnya dan meningkatkan perlindungan anak-anak dari tindak pidana pemerkosaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Melibatkan Anak Di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait mengatur serangkaian mekanisme yang digunakan dalam penegakan hukum kejahatan pemerkosaan yang melibatkan anak di Indonesia. Aparat penegak hukum harus memahami dengan baik berbagai pasal yang relevan dalam KUHP serta prosedur konkret yang harus diambil untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelaku pemerkosaan anak. Pasal 289, 292, 296, dan 332 adalah pasal-pasal KUHP yang paling relevan dalam situasi ini. Pasal

289 mengatur pemerkosaan yang mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban yang tidak bersedia atau tidak mampu memberikan persetujuan. Pelanggaran yang diatur dalam Pasal 289 akan dianggap lebih serius jika korbannya adalah anak di bawah umur. Pasal 292 mengatur pidana bagi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur yang belum dewasa, sementara Pasal 296 mengatur pencabulan, yaitu persetubuhan dengan anak di bawah umur tanpa unsur kekerasan. Pasal 332 mengatur pencabulan dengan ancaman pidana penjara, yang melibatkan tindakan cabul terhadap anak di bawah umur atau anak di bawah pengawasan.

Dalam kasus pemerkosaan anak, laporan atau pengaduan dari korban atau pihak yang terkait memulai proses penegakan hukum.² Kepolisian akan melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti dan mencari pelaku setelah menerima laporan. Untuk memastikan keadilan bagi korban dan memastikan bahwa pelaku diidentifikasi dengan benar, penyelidikan harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelidikan Tindak Pidana adalah salah satunya.

Setelah penyelidikan selesai, hasilnya akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dituntut di pengadilan. Jaksa akan menentukan apakah pelaku harus didakwa setelah meninjau kembali bukti polisi. Undang-undang acara pidana seperti KUHP mengatur prosedur ini. Setelah kasus dibawa ke pengadilan, pengadilan akan memutuskan apakah pelaku bersalah. Jika pengadilan menemukan pelaku bersalah, pengadilan akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan undang-undang, termasuk hukuman pidana penjara, setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada dan pernyataan dari kedua belah pihak, yaitu jaksa penuntut umum dan penasihat hukum pelaku.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pemerkosaan anak tidak hanya berhenti di pengadilan. Korban juga harus dilindungi dan dipulihkan. Korban pemerkosaan anak memiliki hak untuk mendapatkan dukungan psikososial, layanan kesehatan, pendampingan hukum,

² tim. "Yang Harus Dilakukan Jika Polisi Abaikan Laporan Pengaduan." nasional, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211009071149-12-705486/yang-harus-dilakukan-jika-polisi-abaikan-laporan-pengaduan>.

dan bantuan lainnya.³ Oleh karena itu, penegak hukum harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga perlindungan anak dan kelompok non-pemerintah untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan mereka mendapatkan perlindungan dan layanan pemulihan yang memadai. Upaya untuk mencegah pemerkosaan anak juga sangat penting dalam menangani kasus ini. Sangat penting bagi masyarakat untuk lebih memahami pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan cara melindungi diri dari ancaman kekerasan, program pendidikan yang menyoar anak-anak, orang tua, dan masyarakat umum harus dibuat. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan tempat yang aman bagi anak-anak dan menghindari pemerkosaan.

Lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat penting dalam hal ini karena mereka membantu korban pemerkosaan anak, mendorong perubahan kebijakan, dan mengawasi pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan hak-hak anak. KPAI juga dapat bertindak sebagai suara bagi korban pemerkosaan anak dan memastikan bahwa kepentingan mereka dipertimbangkan dalam kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah.⁴ Oleh karena itu, penegakan hukum atas tindak pidana pemerkosaan anak melibatkan banyak proses yang rumit, dimulai dari penyelidikan polisi, penuntutan jaksa, hingga pengadilan. Namun, penegakan hukum tidak boleh menjadi satu-satunya langkah dalam proses ini. Dalam memerangi pemerkosaan anak, perlindungan, pemulihan, dan pencegahan sangat penting. Untuk mencapainya, berbagai pihak—pemerintah, lembaga perlindungan anak, masyarakat sipil, dan anggota masyarakat—harus bekerja sama. Berbagai langkah yang komprehensif perlu dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum dan melindungi anak dari tindak pidana pemerkosaan.

1. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus pemerkosaan anak dan hak-hak korban. Program penyuluhan

³ “Siaran Pers.” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-peringatan-37-tahun-pengesahan-cedaw-24-juli-2021>.

⁴ “KPAI : KEDEPANKAN PERSPEKTIF ANAK DALAM PENANGANAN KASUS BULLYING CILACAP.” Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 7 Oktober 2023, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-kedepankan-perspektif-anak-dalam-penanganan-kasus-bullying-cilacap>.

dan kampanye sosial dapat membantu mengurangi stigma sosial dan memberikan dukungan lebih kepada korban.

2. Perlu ada peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, dalam menangani kasus pemerkosaan anak yang sensitif dan profesional. Proses penyelidikan dan penuntutan dapat ditingkatkan dengan pelatihan penanganan korban anak, psikologi anak, dan teknik wawancara yang tepat.
3. Dalam menangani kasus pemerkosaan anak, lembaga perlindungan anak, kepolisian, jaksa, dan pengadilan harus bekerja sama lebih baik. Organisasi-organisasi ini dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan yang tepat, proses hukum berjalan lancar, dan pelaku kejahatan dihukum dengan tegas sesuai dengan hukum.

Selain mengambil tindakan hukum, upaya pencegahan juga harus ditingkatkan melalui program pendidikan dan sosialisasi di sekolah, keluarga, dan komunitas. Pendidikan seksual yang menyeluruh, promosi kesetaraan gender, dan kampanye anti-kekerasan dapat membantu mengubah norma sosial yang merugikan dan mencegah pemerkosaan anak.

2. Yang Dapat Dilakukan Lembaga Perlindungan Anak, Seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Untuk Membantu dan Mewakili Anak-Anak yang Menjadi Korban Pemerkosaan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia. Lembaga ini memiliki banyak tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan membantu dan mewakili anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan. KPAI dapat melakukan sejumlah tindakan konkret untuk mendukung, melindungi, dan mendukung anak-anak yang terkena dampak kejahatan seksual dalam situasi seperti ini.⁵ KPAI dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Penyediaan Bantuan dan Dukungan Psikososial

⁵ “Kekerasan Seksual (Online) Pada Anak di Indonesia Sebuah Respon Atas Kebijakan Negara.” Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 22 Maret 2014, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/kekerasan-seksual-online-pada-anak-di-indonesia-sebuah-respon-atas-kebijakan-negara>.

KPAI memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan dan dukungan psikososial kepada anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan. Ini dapat termasuk konseling individu atau kelompok, layanan medis, dan dukungan emosional untuk membantu korban mengatasi trauma yang disebabkan oleh tindak kejahatan. KPAI dapat memastikan bahwa korban pemerkosaan anak mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan bekerja sama dengan lembaga kesehatan dan psikolog profesional.

2. Pemberian Bantuan Hukum

KPAI memiliki kemampuan untuk menawarkan bantuan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan keadilan ditegakkan. Ini termasuk memberikan informasi tentang proses hukum, mendampingi korban selama penyelidikan dan persidangan, dan bekerja sama dengan pengacara atau lembaga bantuan hukum lainnya untuk memberikan representasi hukum kepada korban. KPAI juga dapat memperjuangkan hak-hak korban dalam sistem hukum dan membantu mereka mendapatkan kompensasi atau restitusi yang pantas.

3. Perubahan Kebijakan

KPAI dapat mendorong perubahan kebijakan hukum dan sosial untuk meningkatkan perlindungan anak dari pemerkosaan. Perubahan seperti ini dapat mencakup penguatan undang-undang yang melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, meningkatkan kapasitas dan sumber daya penegak hukum dalam menangani kasus pemerkosaan anak, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari pemerkosaan.

4. Pendampingan dan Monitoring Kasus

KPAI dapat membantu dan mengawasi kasus pemerkosaan anak untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Ini termasuk mengawasi penyelidikan oleh penegak hukum, memastikan bahwa hak-hak korban dihormati selama proses hukum, dan memastikan bahwa pelaku kejahatan dikenakan hukuman yang pantas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pendidikan dan Pelatihan

KPAI memiliki kemampuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada orangtua, guru, petugas kesehatan, dan anggota masyarakat lainnya tentang tanda-tanda pemerkosaan anak, cara melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, dan prosedur yang harus diikuti jika anak menjadi korban pemerkosaan. Melalui pelatihan ini, KPAI dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah pemerkosaan anak dan memberi pendidikan dan pelatihan yang diperlukan.

6. Berkolaborasi dengan Lembaga

KPAI dapat bekerja sama dengan berbagai organisasi yang membantu menjaga anak-anak. Ini termasuk lembaga pemerintah, non-pemerintah, sekolah, dan lembaga keagamaan. KPAI dapat memperluas jangkauan melalui kerjasama ini. dan dampaknya terhadap perlindungan anak-anak dari pemerkosaan dan penyediaan bantuan yang lebih lengkap bagi korban pemerkosaan.

7. Pendampingan Psikologis dan Sosial

KPAI dapat memberikan bantuan psikologis dan sosial kepada korban pemerkosaan anak selain bantuan hukum. Anak-anak yang mengalami trauma akibat pemerkosaan dapat mendapat dukungan yang kuat dari pekerja sosial dan psikolog yang terlatih. Pendekatan pendampingan ini dapat membantu korban mengatasi ketakutan, kecemasan, dan trauma yang mungkin mereka alami. Ini juga dapat membantu mereka dalam proses pemulihan.

8. Advokasi untuk Akses Layanan Kesehatan

KPAI juga dapat bertindak untuk memastikan bahwa korban pemerkosaan anak memiliki akses yang memadai ke layanan medis yang mereka butuhkan. Ini termasuk layanan medis darurat, pemeriksaan forensik, dan konseling psikologis. KPAI juga dapat bekerja sama dengan lembaga kesehatan dan pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan medis yang tersedia bagi korban pemerkosaan anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang komprehensif.

9. Penggalangan Dana dan Sumber Daya

KPAI dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya untuk mendukung programnya dalam membantu korban pemerkosaan anak. Cara-cara ini termasuk mengajukan proposal proyek kepada donor, mengatur acara penggalangan dana, dan bekerja sama dengan mitra organisasi untuk mendapatkan

dana yang diperlukan. KPAI dapat memperluas cakupan dan efisiensi programnya untuk melindungi anak-anak dengan sumber daya yang memadai.

10. Pendidikan Pencegahan dan Kesadaran

KPAI dapat berkonsentrasi pada pendidikan pencegahan dan kesadaran tentang pemerkosaan anak selain memberikan bantuan kepada korban. Ini dapat dicapai melalui program pendidikan di sekolah, kampanye kesadaran di masyarakat, dan penyuluhan kepada orangtua dan pengasuh. Dengan melakukan ini, KPAI dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan memberikan informasi tentang cara mencegahnya.

11. Kerjasama dengan Media

KPAI juga dapat bekerja sama dengan media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendapatkan dukungan untuk memerangi pemerkosaan anak. Melalui liputan, kampanye sosial, dan kolaborasi dengan wartawan, KPAI dapat menyuarakan masalah pemerkosaan anak, memberikan informasi yang akurat, dan mendorong dukungan publik untuk perlindungan anak-anak.

12. Pemantauan dan Evaluasi Program

KPAI dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan programnya berfungsi dengan baik. Ini termasuk mengumpulkan data tentang jumlah kasus pemerkosaan anak, bagaimana masyarakat merespons program perlindungan anak, dan bagaimana intervensi yang dilakukan berdampak. Dengan menganalisis data ini, KPAI dapat mengevaluasi keberhasilan programnya dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak.

13. Pelatihan untuk Penegak Hukum

Selain pendidikan masyarakat, KPAI dapat memberikan pelatihan kepada penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, tentang cara menangani kasus pemerkosaan anak dengan hati-hati dan efektif. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang undang-undang yang melindungi anak, teknik interogasi yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan pemahaman tentang efek trauma pada korban pemerkosaan anak.

14. Penguatan Kerjasama dengan Lembaga Internasional

KPAI dapat bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNICEF, UN Women, dan organisasi hak asasi manusia lainnya untuk bertukar informasi, berbagi praktik terbaik, dan mendapatkan dukungan teknis untuk perlindungan anak.

Terakhir, KPAI memiliki wewenang untuk mendorong pelaksanaan dan penguatan undang-undang yang melindungi anak dari pemerkosaan. Ini termasuk mendukung revisi undang-undang saat ini untuk meningkatkan perlindungan anak, memastikan dana yang cukup untuk program perlindungan anak, dan mendukung kebijakan dan hukum publik yang mendukung hak-hak anak. Dengan melakukan hal-hal ini, KPAI dapat menjadi lebih aktif dan efektif dalam membantu dan mewakili anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan keadilan tercapai bagi mereka yang paling rentan di masyarakat melalui perlindungan, advokasi, pemberdayaan, dan pendidikan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga dapat berfungsi sebagai mediator antara lembaga-lembaga yang dapat menawarkan bantuan dan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan selain melakukan upaya-upaya yang telah disebutkan sebelumnya. KPAI dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa korban pemerkosaan anak mendapatkan perawatan dan perlindungan yang sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak. Selain itu, KPAI dapat membantu anak-anak dan keluarga mereka mendapatkan akses ke layanan medis, konseling psikologis, dan bantuan sosial lainnya yang diperlukan untuk mengatasi dampak traumatis pemerkosaan.

Untuk melindungi anak-anak dari pemerkosaan, fokus utama KPAI adalah pencegahan. KPAI dapat melakukan kampanye penyuluhan di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan risiko pemerkosaan anak dan pentingnya melindungi mereka dari kekerasan seksual. Selain itu, KPAI juga dapat bekerja sama dengan media massa untuk menyebarkan pesan pencegahan dan mengajarkan masyarakat tentang cara melindungi anak-anak dari pemerkosaan. Dengan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah pemerkosaan anak, KPAI dapat membantu mengurangi jumlah kasus pemerkosaan anak. KPAI juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam mendorong perubahan kebijakan dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dengan menjadi penjaga dan

pembela bagi anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan, KPAI dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan didengar dan diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Mereka juga dapat menjadi suara bagi anak-anak yang mungkin tidak memiliki akses atau kemampuan untuk menyuarakan hak-hak mereka sendiri.

KPAI dapat memainkan peran penting dalam membantu dan mewakili anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan dengan melakukan hal-hal seperti ini.⁶ Melalui upaya perlindungan, advokasi, pendampingan, dan pendidikan, KPAI dapat membantu anak-anak mendapatkan keadilan, pemulihan, dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk mengatasi dampak traumatis dari kejahatan seksual yang mereka alami.

3. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dapat Ditingkatkan Melalui Kerangka Hukum Pidana yang Ada

Perlindungan anak dan penegakan hukum yang efektif bergantung pada pencegahan pemerkosaan terhadap anak. Dalam konteks ini, peningkatan upaya pencegahan melalui kerangka hukum pidana yang ada sangat penting untuk mengurangi kemungkinan pemerkosaan anak dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Dengan memperkuat kerangka hukum saat ini, baik melalui revisi undang-undang maupun penegakan hukum yang lebih baik, kita dapat mengurangi kemungkinan pemerkosaan anak dan meningkatkan respons terhadap kasus-kasus yang terjadi. Kerangka hukum pidana saat ini dapat diubah untuk meningkatkan upaya mencegah pemerkosaan anak, seperti yang berikut:

1. Peningkatan Hukuman dan Sanksi

Salah satu cara untuk menghentikan pemerkosaan anak adalah dengan meningkatkan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Revisi undang-undang pidana dapat memperketat hukuman bagi pelaku pemerkosaan anak, termasuk penjara lebih lama atau bahkan hukuman mati dalam kasus-kasus yang sangat serius. Diharapkan bahwa memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku akan membuat mereka jera dan mencegah kejahatan seksual terhadap anak.

⁶ Reza, Hilman. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Januari 2014. repository.uinjkt.ac.id, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25006>.

2. Penguatan Penegakan Hukum

Penguatan penegakan hukum adalah langkah penting untuk mencegah pemerkosaan anak, selain meningkatkan hukuman. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan aparat penegak hukum untuk menemukan, menyelidiki, dan menuntut kasus pemerkosaan anak. Aparat penegak hukum akan lebih mampu menangani kasus pemerkosaan anak jika diberi pelatihan dan pembaruan tentang hukum dan metode investigasi yang berkaitan dengan masalah ini.

3. Perlindungan Korban

Bagian penting dari pencegahan pemerkosaan anak adalah memberikan perlindungan kepada korbannya. Penting bagi kerangka hukum pidana untuk melindungi identitas dan kesejahteraan korban selama proses penyidikan dan persidangan. Ini dapat mencakup penggunaan teknologi untuk melindungi identitas korban, mengatur persidangan tertutup untuk menjaga privasi mereka, dan memberikan dukungan psikologis dan sosial yang mereka butuhkan.

4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Upaya pencegahan juga harus berkonsentrasi pada meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendidikan tentang pemerkosaan anak. Kerangka hukum harus mendukung program pendidikan di sekolah dan kampanye kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pemerkosaan anak, tanda-tanda yang harus diperhatikan, dan cara melaporkannya. Kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan tempat yang lebih aman bagi anak-anak dan mendorong lebih banyak pelaporan kasus pemerkosaan.

5. Kerjasama Antarlembaga

Kerangka hukum harus mendorong kerjasama erat antara lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak, termasuk lembaga pemerintah, non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan.⁷ Kerjasama ini diperlukan untuk berbagi informasi, mengkoordinasikan tindakan, dan membangun kemampuan bersama untuk mencegah pemerkosaan anak.

6. Rehabilitasi dan Reintegrasi Pelaku

⁷ Usman, Alih. "SIAPA YANG WAJIB MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK?"
bpsdm.kemenkumham.go.id, 2 Mei 2023, <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/siapa-yang-wajib-memberikan-perlindungan-terhadap-anak>.

Meskipun prioritas utama adalah melindungi korban dan mencegah kejahatan, penting juga untuk memperhatikan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku pemerkosaan anak. Untuk mencegah pelaku dari kekambuhan dan memastikan bahwa mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi anak-anak di masa depan, kerangka hukum pidana harus menyediakan program rehabilitasi yang efektif bagi mereka.

7. Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi

Kemajuan dalam teknologi dan sistem informasi dapat membantu mencegah pemerkosaan anak. Contohnya termasuk pengembangan sistem pelaporan online yang memudahkan pelaporan kasus pemerkosaan, penggunaan analisis data untuk menemukan tren dan pola dalam kejahatan seksual terhadap anak, dan penggunaan teknologi forensik untuk mengumpulkan bukti digital yang kuat dalam penyelidikan kasus pemerkosaan.

8. Pelatihan dan Pendidikan Orangtua dan Pengasuh

Orangtua dan pengasuh memainkan peran penting dalam melindungi anak-anak dari pemerkosaan. Oleh karena itu, kerangka hukum harus memberikan pelatihan dan pendidikan kepada orangtua dan pengasuh tentang tanda-tanda pemerkosaan anak, cara melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, dan apa yang harus dilakukan jika anak menjadi korban pemerkosaan.

9. Pengembangan Program Rehabilitasi Korban

Pengembangan program rehabilitasi yang menyeluruh untuk korban pemerkosaan anak harus didukung oleh kerangka hukum pidana. Ini termasuk akses ke dukungan sosial dan psikologis, layanan kesehatan mental dan fisik, dan pelatihan dan pendidikan yang membantu korban memperbaiki diri dan memperoleh kepercayaan diri.

Untuk meningkatkan upaya untuk mencegah pemerkosaan terhadap anak melalui kerangka hukum pidana saat ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai elemen. Kerangka hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam membangun landasan yang kuat untuk mencegah, menemukan, menangani, dan menghukum pelaku kejahatan pemerkosaan anak. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektoral, kesadaran publik, dan evaluasi implementasi program pencegahan dan kebijakan harus mendukung upaya untuk memperkuat hukum yang ada. Akibatnya, diharapkan anak-anak dapat hidup

dalam lingkungan yang lebih aman dan mendukung di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa khawatir menjadi korban kekerasan seksual.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

kesimpulan

Untuk menjamin keselamatan dan keamanan anak-anak di masyarakat, sangat penting untuk melindungi mereka dari tindak pidana pemerkosaan. Tinjauan mekanisme penegakan hukum terhadap kasus pemerkosaan anak di Indonesia menunjukkan bahwa masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi. Salah satunya adalah tingkat kesadaran dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap masalah ini, serta jumlah korban anak yang terbatas yang dapat mendapatkan keadilan.

Organisasi perlindungan anak seperti KPAI membantu dan mewakili korban pemerkosaan anak. Kolaborasi antar lembaga serta pendampingan hukum, advokasi, dan dukungan psikososial dari KPAI dapat memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan keadilan terpenuhi.

Selain itu, perbaikan kerangka hukum pidana sangat penting untuk mencegah pemerkosaan anak. Perbaikan ini mencakup sanksi yang lebih tegas bagi pelaku, peningkatan kemampuan penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari pemerkosaan. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks pemerkosaan memerlukan kerja sama lintas sektor dan komitmen bersama untuk membuat lingkungan yang aman di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Saran

1. Kami menyarankan agar dilakukannya kerjasama yang kuat antara berbagai lembaga, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak, lembaga penegak hukum, dan organisasi non-pemerintah, sangat penting. Kerjasama yang efektif ini akan memungkinkan informasi yang lebih baik, koordinasi tindakan, dan berbagi pengalaman dalam meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan anak.
2. Kemudian dengan diadakan sosialisasi pendidikan masyarakat, karena diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pemerkosaan anak dan pentingnya melindungi mereka. Ini dapat dicapai melalui

kampanye penyuluhan, seminar, lokakarya, dan program pendidikan komunitas di sekolah dan komunitas.

3. Lalu yang terakhir dengan meningkatkan kemudahan akses korban terhadap bantuan hukum dan dukungan psikososial. Perlu dijamin bahwa korban pemerkosaan anak memiliki akses yang mudah dan adil terhadap bantuan hukum dan dukungan psikososial yang baik, yang mencakup konseling, pendampingan selama proses hukum, dan layanan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Peningkatan akses ini akan meningkatkan perlindungan hukum dan mendukung pemulihan korban secara keseluruhan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelidikan Tindak Pidana

Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Lain-lain

Dinsos PPPA - MENGENALI TINDAK KEKERASAN PADA WANITA DAN ANAK-ANAK. Retrieved from <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/596/mengenali-tindak-kekerasan-pada-wanita-dan-anak-anak>.

“KPAI: KEDEPANKAN PERSPEKTIF ANAK DALAM PENANGANAN KASUS BULLYING CILACAP.” Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 7 Oktober 2023, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-kedepankan-perspektif-anak-dalam-penanganan-kasus-bullying-cilacap>.

tim. “Yang Harus Dilakukan Jika Polisi Abaikan Laporan Pengaduan.” nasional, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211009071149-12-705486/yang-harus-dilakukan-jika-polisi-abaikan-laporan-pengaduan>.

“Siaran Pers.” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-peringatan-37-tahun-pengesahan-cedaw-24-juli-2021>.

“Kekerasan Seksual (Online) Pada Anak di Indonesia Sebuah Respon Atas Kebijakan Negara.” Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 22 Maret 2014,

<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/kekerasan-seksual-online-pada-anak-di-indonesia-sebuah-respon-atas-kebijakan-negara>.

Reza, Hilman. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Januari 2014. repository.uinjkt.ac.id, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25006>.

Usman, Alih. "SIAPA YANG WAJIB MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK?" bpsdm.kemenkumham.go.id, 2 Mei 2023, <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/siapa-yang-wajib-memberikan-perlindungan-terhadap-anak>.